



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
Bagi Kongres Advokat Indonesia**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Sistematika Pemaparan

Model Peradilan Konstitusi dan Pembentukan MK

Kedudukan MK dalam Struktur Ketatanegaraan

Kewenangan dan Fungsi MK

Contoh-Contoh dan Statistik Putusan MK

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**



**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Model *Judicial Review*

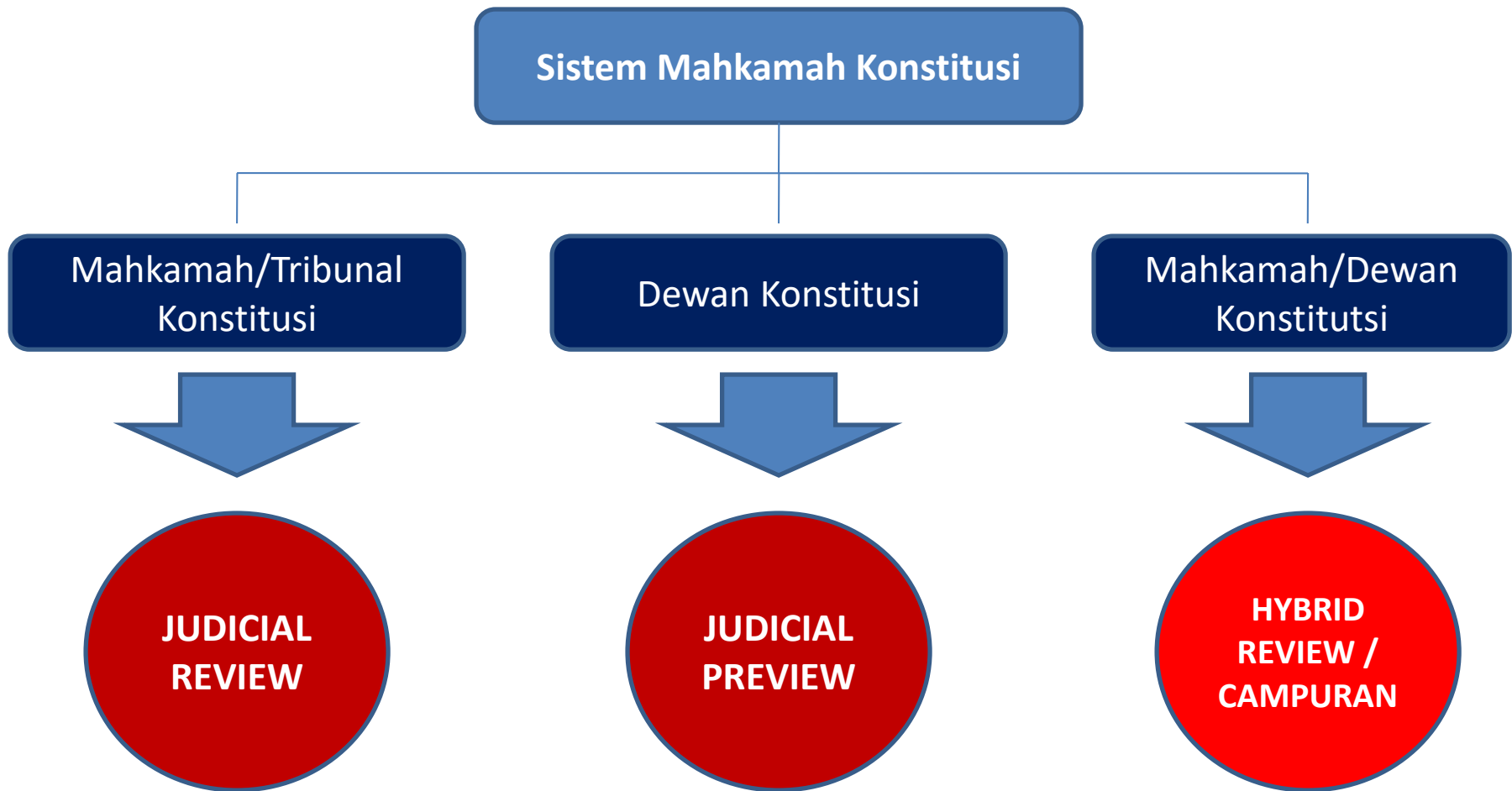
Sistem Terdesentralisasi / Sistem Amerika

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Kanada, Australia, Filipina, India, Malaysia, dsb.

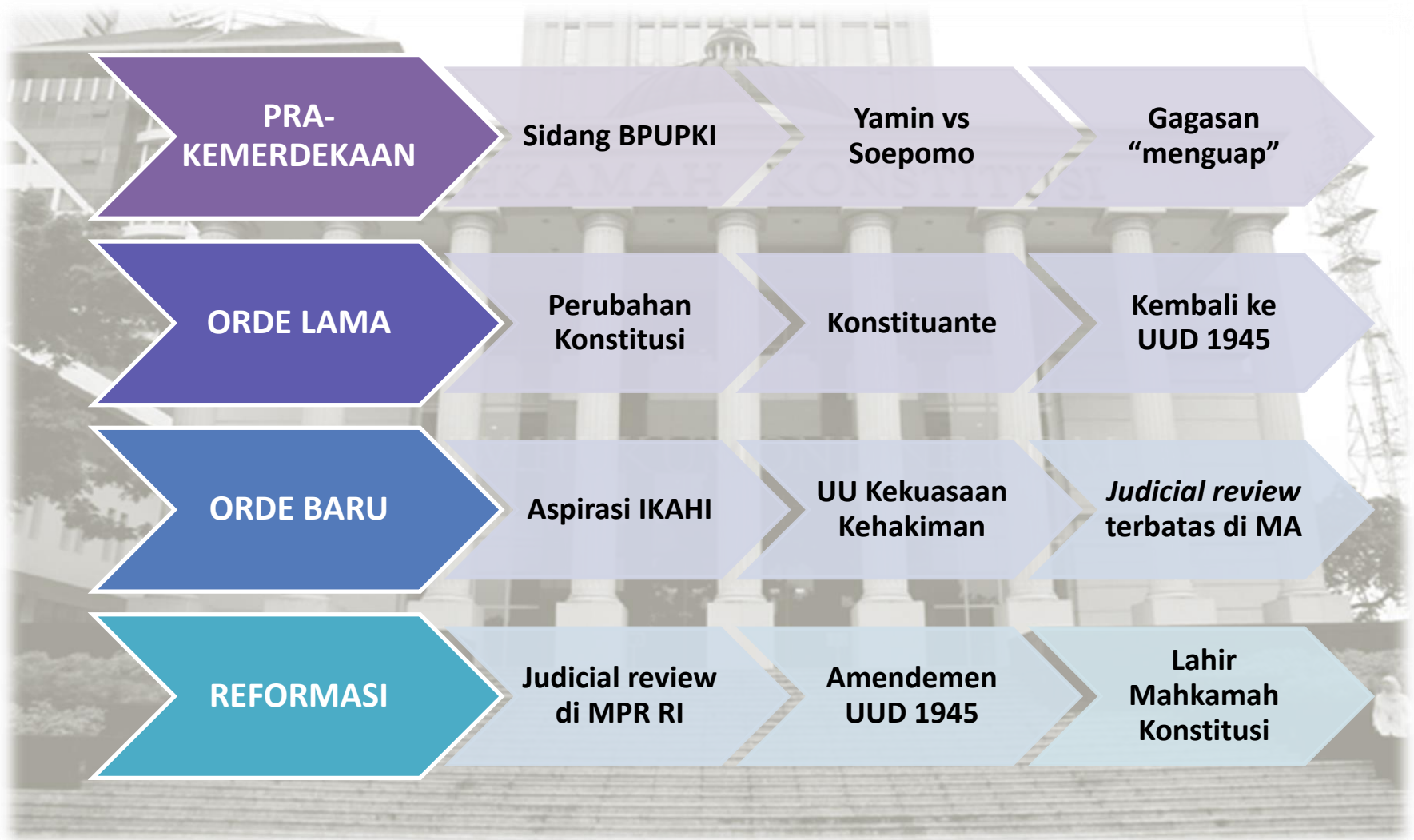
Sistem Terpusat / Sistem Eropa / Sistem Kelsenian

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, **INDONESIA**, dsb.

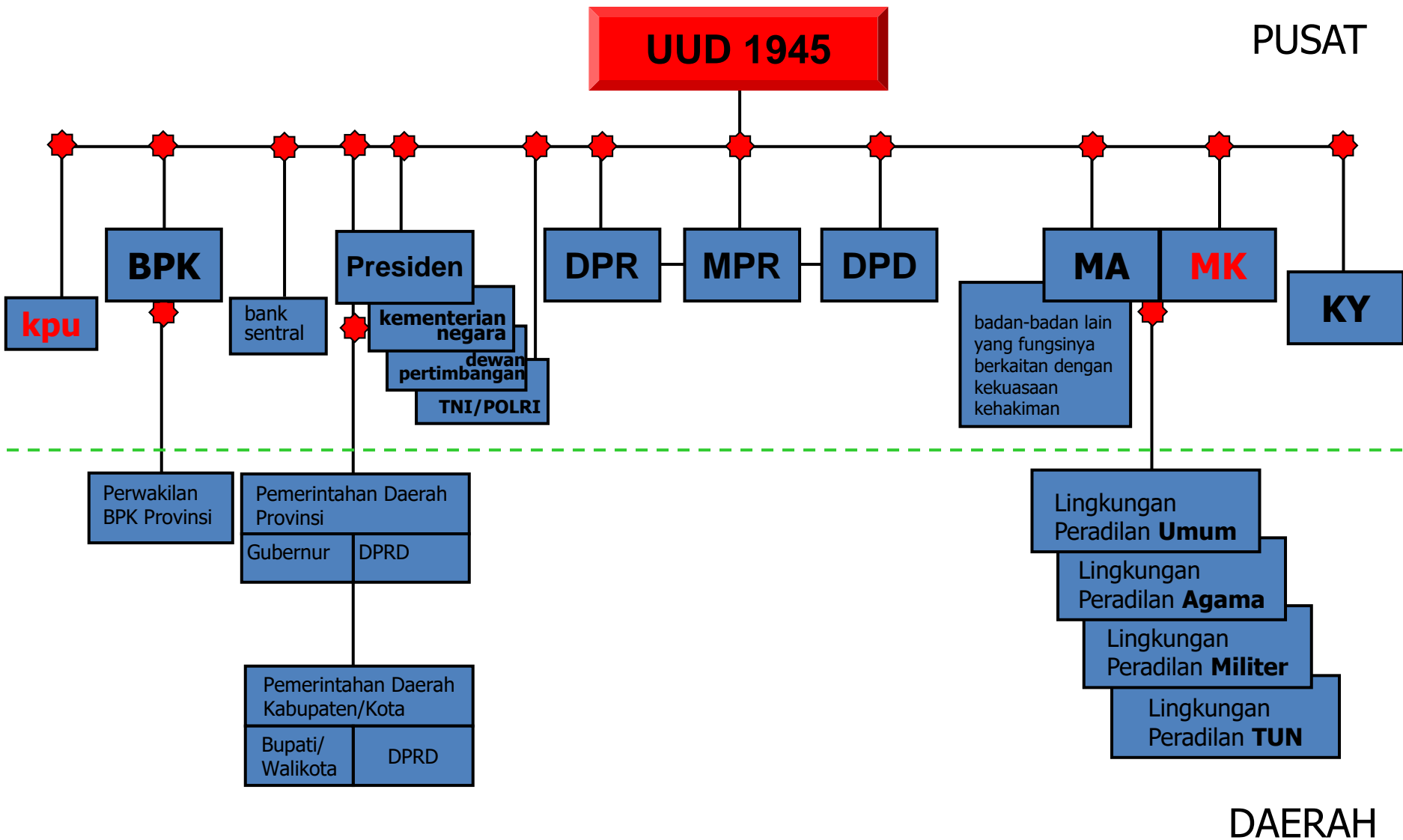
Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 
- **Menguji UU terhadap UUD 1945**

2

- 
- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945


3

- 
- Memutus Pembubaran Partai Politik

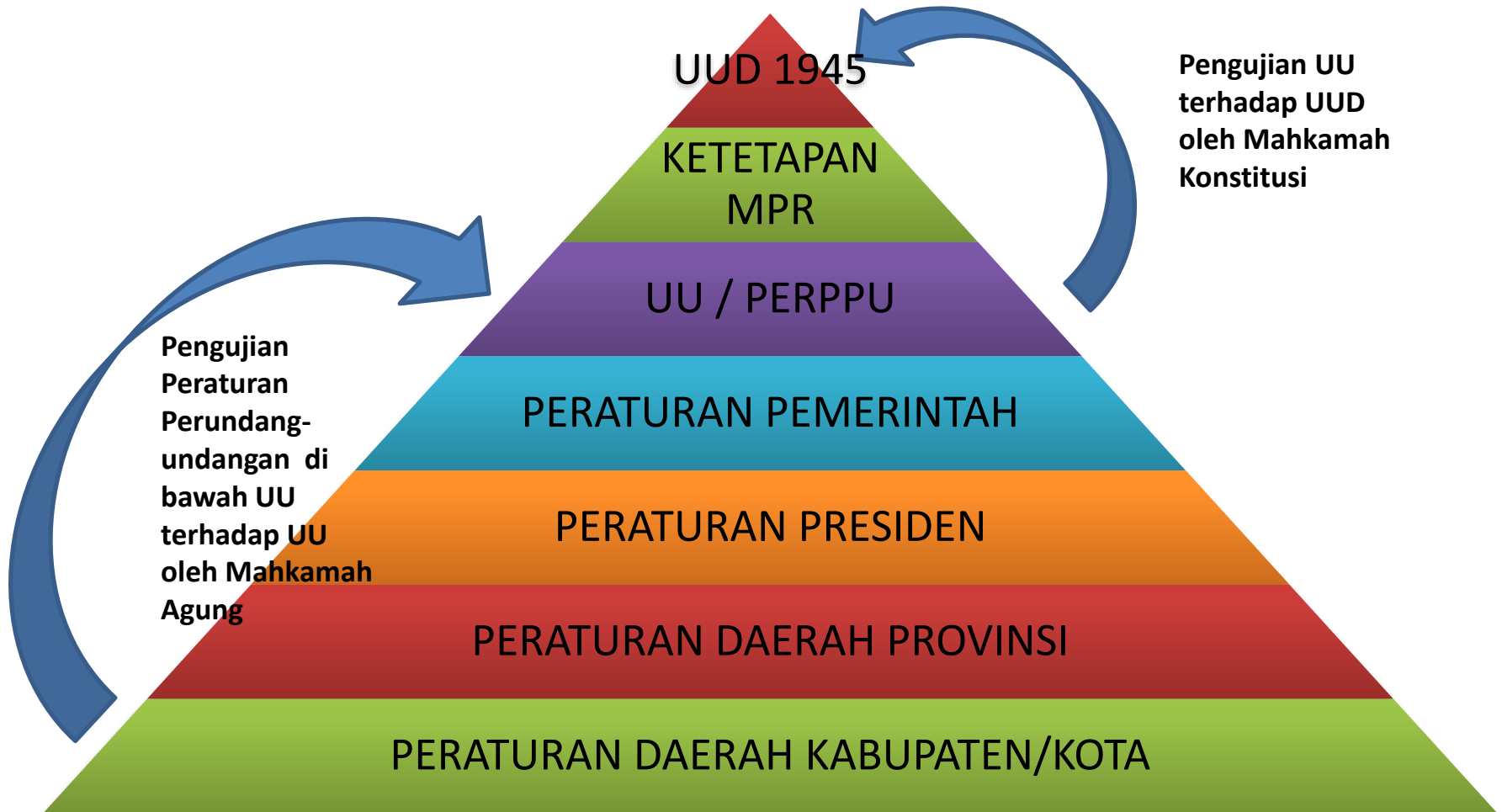
4

- 
- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- 
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda:
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Pemohon dan Termohon Perselisihan Hasil Pemilu

PEMOHON:

1. **Pilpres:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pileg:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pilkada:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

TERMOHON:

1. **KPU Pusat**
2. **KPU Provinsi**
3. **KPU Kabupaten/Kota**



Rekapitulasi Putusan MK (s.d. 7 Oktober 2020)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur	Ketetapan	Tidak Berwenang
PUU	1.353	266	482	440	133	-	23	-	9
SKLN	26	1	3	16	5	-	-	-	-
Pemilu Legislatif	1.077	99	594	300	27	15	30	12	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	982	76	474	400	27	-	5	-	-

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, Badan Hukum Pendidikan, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** Ketenagalistrikan, Sumber Daya Air, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, Identitas Kepercayaan, Zakat, Sertifikasi Halal, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat dan berekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, KUHP dan KUHPA, dsb.
- **Pemilu: ...**



Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu



Contoh-Contoh Putusan MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - dan lain sebagainya



Rekapitulasi Putusan Pilkada

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2

Bagaimana dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020?

TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- **Peneliti Senior dan *Speechwriter* di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) – DKI Jakarta Raya (2016-sekarang)**
- **Dosen Program Doktor dan Magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta berbagai Perguruan Tinggi lainnya (2008-sekarang)**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**